

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepentingan nasional Tiongkok dalam keterlibatannya pada AMRO, dengan menggunakan kerangka empat kategori kepentingan nasional yang dikembangkan oleh Nuechterlein. Secara keseluruhan, kepentingan ekonomi Tiongkok dalam AMRO berbasis pada tiga pilar data yang saling memperkuat dan membentuk sebuah ekosistem strategis yang terintegrasi. Pertama, kepentingan ekonomi terbukti menjadi motif paling dominan dan berada pada tingkat intensitas vital. Kesimpulan ini didukung oleh volume perdagangan Tiongkok-ASEAN yang mencapai \$982,34 miliar pada 2024, kontribusi Tiongkok dalam CMIM senilai \$76,80 miliar atau 32 persen dari total kontribusi, serta posisi kawasan ASEAN+3 yang menyumbang 25,77 persen PDB dunia. Data-data ini menegaskan bahwa keterlibatan Tiongkok dalam AMRO tidak dapat dilepaskan dari ketergantungan struktural ekonominya terhadap stabilitas dan keterbukaan kawasan ASEAN+3.

Kedua, kepentingan tatanan dunia menempati posisi kedua dengan intensitas major. Kepentingan ini terwujud melalui hak suara CMIM sebesar 28,41 persen yang setara dengan Jepang, mekanisme co-chairmanship yang dirotasi setiap tahun, serta preseden historis pembagian masa jabatan Direktur pertama AMRO antara kandidat Tiongkok dan Jepang pada 2011—sebuah pola akomodasi kesetaraan pengaruh yang terus berlanjut hingga saat ini. Temuan ini menunjukkan bahwa pengaruh institusional Tiongkok dalam AMRO bersifat

signifikan namun tidak eksklusif, dan senantiasa dinegosiasikan bersama Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara ASEAN.

Ketiga, kepentingan ideologi berada pada rentang intensitas peripheral hingga major. Kepentingan ideologi terwujud melalui dukungan Tiongkok terhadap model tata kelola alternatif yang menekankan non-intervensi dan fleksibilitas kebijakan, sebuah pola yang juga teramati pada institusi Tiongkok lain seperti AIIB dan NDB. Nuechterlein sendiri menekankan pentingnya membedakan antara kepentingan yang menjadi tujuan akhir dan kepentingan yang berfungsi sebagai sarana untuk mencapainya, dalam konteks ini stabilitas regional dan pengaruh institusional lebih tepat dipahami sebagai instrumen bagi tercapainya kepentingan ekonomi Tiongkok, bukan sebagai tujuan yang berdiri sendiri.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Tiongkok dalam AMRO paling akurat dipahami sebagai proyeksi kepentingan ekonomi yang konkret dan terukur, yang diperkuat oleh kepentingan tatanan dunia yang sebagai instrumen kelembagaan, serta didukung ideologi yang bersifat mendukung dan memperkuat legitimasi. Keempat kepentingan tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan membentuk satu kesatuan strategi kepentingan nasional yang terkalkulasi dan saling memperkuat.

5.2 Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi cakupan analisis maupun kedalaman pembahasan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menerapkan kerangka Nuechterlein pada Jepang atau Korea Selatan guna menguji apakah struktur hierarkis kepentingan

yang ditemukan dalam penelitian ini bersifat khas Tiongkok atau justru berlaku umum bagi anggota Plus-3 lainnya. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat mengkaji kembali intensitas kepentingan pertahanan apabila CMIM pada masa depan benar-benar diaktifkan, serta menguji secara empiris melalui analisis isi laporan AMRO apakah rotasi *co-chairmanship* dan kepemimpinan benar-benar memengaruhi arah kebijakan institusi. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas perbandingan ke institusi lain yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi Tiongkok, seperti AIIB, NDB, dan Belt and Road Initiative, agar pola pengaruh Tiongkok dapat dipahami secara lebih komprehensif. Di sisi lain, negara-negara ASEAN disarankan memperkuat koordinasi intra-kawasan agar hak suara kolektif sebesar 28,41 persen dalam CMIM dapat dimanfaatkan secara lebih efektif sebagai penyeimbang dinamika pengaruh Tiongkok-Jepang. Indonesia juga perlu mengambil peran yang lebih aktif pada kesempatan *co-chairmanship* mendatang, sementara AMRO disarankan untuk terus menjaga transparansi dalam proses kepemimpinan dan mempertimbangkan simulasi aktivasi CMIM secara berkala, mengingat mekanisme tersebut belum pernah diuji dalam praktik nyata.

